



**KEBIJAKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KOTA
PEKALONGANTAHUN 2016-2020**

Skripsi

**Disusun untuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Penyusun

SYIFANA AWAN ARDHINI

14010118130090

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2022**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap : Syifana Awan Ardhini
2. Nomor Induk Mahasiswa : 14010118130090
3. Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 12 Juli 1999
4. Departemen / Program Studi : Departemen Politik dan Pemerintahan / S1- Ilmu Pemerintahan
5. Alamat : Jl Dharma bakti 87 B Pekalongan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi / TA) yang saya tulis berjudul :

Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020
Adalah benar-benar **Hasil Karya Ilmiah Tulisan Saya Sendiri**, bukan hasil karya ilmiah orang lain dan tidak juga mengandung plagiasi dari sumber informasi lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil uji kemiripan Turnitin yang kurang dari 20%. Apabila dikemudian hari ternyata karya ilmiah yang saya tulis itu terbukti bukan hasil karya ilmiah saya sendiri atau hasil plagiasi karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang, 25 Januari 2022

Pembuat
Pernyataan,



Syifana Awan Ardhini
NIM. 14010118130090

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : “Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota
Pekalongan tahun 2016-2020”
Nama Penyusun : Syifana Awan Ardhini
NIM : 14010118130090
Departemen : Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1
Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Dekan



Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP
NIP. 196408271990011001

Wakil Dekan 1



Dr. Drs. Teguh Yuwono, M. Pol. Admin
NIP. 196908221994031003

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Turtiantoro, M.Si
2. Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP

()

()

Dosen Penguji :

1. Drs. Turtiantoro, M.Si
2. Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP
3. Wijayanto, S.IP, M.Si, Ph.D

()

()

()

HALAMAN MOTTO

“MANUT DALANE GUSTI”

*”PERCAYA BAHWA TUHAN
SELALU MEMILIKI SKENARIO
TERBAIK UNTUK UMATNYA
YANG MAU BERUSAHA DAN
PERCAYA”*

HALAMAN PERSEMBAHAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, Jalan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
2. Terimakasih kepada Papa dan Mama saya yang selalu mendoakan mensupport moral dan materil agar saya dapat menyelesaikan penelitian ini.
3. Terimakasih untuk diri saya sendiri, yang sudah mau berjuang melawan rasa mual dan malas hingga penelitian ini berakhir.
4. Terimakasih kepada Maulidya Khalila Nanda Setiawan yang selalu menjadi tempat pulang terbaik serta dukungan dan sudah memberikan semangat agar segera menyelesaikan penelitian ini.
5. Terimakasih kepada teman- teman terdekat saya yang telah memberi semangat dan motifasi khusus nya kepada Mas Rizam Eko Novianto yang telah menamani serta selalu membantu, Mbak Iis Sugiarti dan Mbak Yuniar Hana Pratiwi yang membantu merapihkan segala ketidak rapihan saya, Putri Sakina yang selalu mendengarkan keluh kesah saya dan membantu mencari solusi.
6. Terimakasih kepada rekan rekan kerja di UKK Imigrasi Kota Pekalongan yang telah memberi semangat dan membantu meringankan pekerjaan saya demi menyelesaikan penelitian ini.
7. Terimakasih kepada pak Sekdin DPMPTSP bapak Supriyadi yang selalu mengingatkan saya agar cepat menyelesaikan penelitian ini dan ceppat lulus. Terimakasih kepada Pak Anas dan Bu Amel yang mengizinkan saya untuk izin bekerja untuk menyelesaikan bebrapa urusan yang menyangkut penelitian ini.

**KEBIJAKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KOTA
PEKALONGANTAHUN 2016-2020
ABSTRAK**

Pengarusutamaan gender masih menjadi isu yang cukup kompleks dan sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota pekalongan. Meskipun komitmen pemerintah Kota Pekalongan dalam pengarusutamaan gender telah dituangkan ke dalam dokumen-dokumen kebijakan publik, tetapi komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal.

Upaya menjawab permasalahan dan tujuan penelitian dilakukan dengan menggunakan teori anggaran responsif gender dan teori kebijakan penganggaran. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Sumber data berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016-2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, dan RPJPD-RKPD 2 tahun terakhir, dan Rencana Kerja & Anggaran (RKA) tahun 2016-2020. Analisis data menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan anggaran responsif gender di Kota Pekalongan tahun 2016-2020 belum dilaksanakan dengan maksimal. Jumlah anggaran responsif gender dari tahun 2016-2020 sangat minim dan terus mengalami penurunan yang signifikan. Jumlah anggaran responsif gender Kota Pekalongan tahun 2016-2020 belum mendapatkan alokasi yang memadai dan terus mengalami penurunan berakibat output dan outcome kegiatan menjadi tidak tercapai. Kendala yang dihadapi dalam kebijakan anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan meliputi: 1) Kendala kebijakan, yaitu lemahnya kekuatan hukum bagi pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam anggaran dan lemahnya komitmen Pemerintah Kota dalam membuat perencanaan anggaran responsif gender). 2) Kendala struktural, yaitu kurangnya kapasitas tim penyusun anggaran yang mampu analisis gender, dominasi struktur pemangku kebijakan, kinerja Dinas masih dirasa belum adil gender, tidak adanya kerjasama khusus dalam anggaran responsif gender. 3) Kendala Kultural, meliputi: (a) Nilai patriarki yang begitu kental di masyarakat. Sehingga ketimpangan relasi gender sangat sulit dirubah. (b) Pandangan gender dan anggaran responsif gender menurut stakeholder masih salah kaprah.

Kata kunci: Pengarusutamaan Gender, Anggaran Responsif Gender, IDG , IPG

**GENDER RESPONSIVE BUDGET POLICY
IN PEKALONGAN CITY 2016-2020
ABSTRACT**

Gender mainstreaming is still a fairly complex issue and often occurs among the people of Pekalongan City. Although the Pekalongan City government's commitment to gender mainstreaming has been stated in public policy documents, the government's commitment to realizing gender equality and justice in various development fields has so far not shown optimal results.

Efforts to answer the problems and research objectives are carried out using gender responsive budget theory and budgeting policy theory. This research is descriptive qualitative. Data collection techniques using documentation and interviews. The data sources are in the form of Government Agencies Performance Accountability Reports for 2016-2020, SKPD Budget Implementation Documents (DPA), and RPJPD-RKPD for the last 2 years, and Work & Budget Plans (RKA) for 2016-2020. Data analysis used content analysis and interactive analysis techniques.

The results show that the gender responsive budget policy in Pekalongan City in 2016-2020 has not been implemented optimally. The number of gender responsive budgets from 2016-2020 is minimal and continues to experience a significant decline. The amount of the gender responsive budget of Pekalongan City in 2016-2020 has not received adequate allocations and continues to decline resulting in the output and outcome of activities being unattainable. Constraints faced in the Gender Responsive budget policy in Pekalongan City include: 1) Policy constraints, namely the weak legal power for the implementation of gender mainstreaming in the budget and the weak commitment of the City Government in making gender responsive budget planning). 2) Structural constraints, namely the lack of capacity of the budget drafting team capable of gender analysis, the dominance of the structure of the policy makers, the performance of the Office is still perceived as not being gender fair, and the absence of special cooperation in gender responsive budgeting. 3) Cultural constraints, including: (a) The patriarchal values are so thick in society. So the inequality of gender relations is very difficult to change. (b) The views of gender and gender responsive budgets according to stakeholders are still misguided.

Keywords: Gender mainstreaming, gender responsive budget, IDG, IPG.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNYA kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau skripsi ini sebagai syarat kelulusan dari Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.

Tugas akhir ini telah di selesaikan dengan baik atas dukungan, bimbingan, petunjuk, masukan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang memberikan kelancaran, kesehatan serta kemudahan, kekuatan untuk segala urusan hambaNYA dalam menyelesaikan skripsi.
2. Orang tua penulis yang tak hentihentinya mendoakan, mendukung penuh baik secara moril maupun materil dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Dr. Drs. Hardi Warsono, MTP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
4. Dr. Dra. Rina Martini, M.Si, Selaku Kepala Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.
5. Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D., Selaku Sekretaris Departemen Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang dan sebagai dosen wali penulis.
6. Drs. Turtiantoro, M.Si Selaku Dosen Pembimbing 1 dalam penulisan skripsi, Terimakasih atas ketersediaanya waktu untuk membimbing saya mulai dari penyusunan seminar proposal,

Sidang Skripsi hingga Skripsi ini dibukukan.

7. Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP Selaku Dosen Pembimbing 2 dalam penulisan skripsi, Terimakasih atas ketersediaanya waktu untuk membimbing saya mulai dari penyusunan seminar proposal, Sidang Skripsi hingga Skripsi ini dibukukan.
8. Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D., Selaku Dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahnya selama ini.
9. Para dosen serta civitas akademika Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
10. Bapak H. Budi Setiawan, SE selaku Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam membantu menyelesaikan penelitian ini.
11. Bapak Bapak Mohamad Azmi Basyir,ST, M.Sc selaku Kepala Badan anggaran DPRD Bidang PUG Kota Pekalongan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi informan dalam membantu menyelesaikan penelitian ini.
12. Ibu Ibu Sri Ruminingsih selaku SEKDA Kota Pekalongan dan Ibu Anita Heru Kusumorini selaku Kepala BAPPEDA Kota Pekalongan yang telah bersedia menjadi narasumber untuk penelitian ini.
13. Rekan rekan SPEKHAM dan PATTIRO yang bersedia meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama dan membagi informasi untuk membantu penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis mohon maaf serta menerima segala masukan baik berupa kritikan dan saran yang membangun

dalam rangka menyempurnakan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 25 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	16
1.1 Latar Belakang	16
1.2 Perumusan Masalah.....	28
1.3 Tujuan Penelitian.....	29
1.4 Kegunaan Penelitian.....	29
1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis	30
1.6 Metode Penelitian.....	58
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PEKALONGAN	71
2.1 Gambaran Umum Kota Pekalongan.....	71
2.2 Gambaran APBD Tahun 2016-2020	77
BAB III KEBIJAKAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER	79
3.1 Anggaran Responsif Gender	79

3.2 Analisis Kebijakan Anggaran Responsif Gender	85
3.3 Kendala yang Dihadapi dalam Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	111
3.2 Analisis Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan	126
BAB IV PENUTUP	130
4.1 Kesimpulan	130
4.1.1 Kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	130
4.1.2 Kendala yang dihadapi dalam kebijakan Anggaran Responsif Gender di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020.....	131
4.2 Rekomendasi.....	132
DAFTAR PUSTAKA	136
Buku	136
Jurnal	137
Internet	138
Undang-Undang	139
LAMPIRAN.....	140

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Index Pembangunan Gender Kota Pekalongan Tahun 2020.....	21
Table 2.1.....	78
Table 3. 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	80
Table 3. 2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Pekalongan.....	81
Table 3. 3 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Pekalongan 2016-2020	82
Table 3. 4 Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Pekalongan 2016-2020	82
Table 3. 5 Pengeluaran perkapita Kota Pekalongan 2016-2020	83
Table 3. 6 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	84
Table 3. 7 Alokasi Anggaran Kegiatan Pengarusutamaan Gender Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	88
Table 3. 8 Langkah Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Pekalongan Tahun 2016-2020	101
Table 3. 9 Analisis Data Pelaksanaan PUG di Kota Pekalongan.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kota Pealongan 2021	77
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	140
Lampiran 2. Transkrip Wawancara Anggota Badan Anggaran DPRD.....	141
Lampiran 3. Transkrip Wawancara SEKDA Kota Pekalongan	144
Lampiran 4. Transkrip Wawancara BAPEDA Kota Pekalongan.....	145
Lampiran 5. Transkrip Wawancara kepala Badan Anggaran DPRD dan Ketua DPRD Kota Pekalongan	146
Lampiran 6. Transkrip Wawancara SPEKHAM.....	149